



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT

SIARAN PERS



Nomor: 37/HMS/SP/IX/2026

Tanggal: 17 September 2026

Bawaslu Jakarta Barat Perkuat Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Jakarta Barat Jelang Tahapan Pemilu

Jakarta Barat - Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Kamis (17/9/2026), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pencegahan serta pengawasan pemilu.

Audiensi tersebut diterima oleh Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Holi Susanto, mewakili Wali Kota Jakarta Barat lin Mutmainnah yang berhalangan hadir. Pemerintah Kota Jakarta Barat menyambut baik audiensi dan membuka ruang kolaborasi dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan.

Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Wanda Gunawan, menyampaikan bahwa audiensi merupakan momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi dengan jajaran Pemerintah Kota Jakarta Barat. Menurutnya, kolaborasi perlu dibangun sejak masa non-tahapan mengingat tahapan pemilu berikutnya akan segera memasuki fase persiapan, sementara Bawaslu Jakarta Barat tetap menjalankan berbagai kegiatan pencegahan dan pengawasan, termasuk pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

"Kolaborasi ini penting untuk kita bangun sejak sekarang. Di masa non-tahapan, kita memiliki ruang yang cukup untuk memperkuat pencegahan, membangun komunikasi, dan menyamakan pemahaman dengan berbagai pihak," ujar Wanda.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Jakarta Barat, Akhi Riannoko, menekankan pentingnya kolaborasi dalam menyebarkan informasi mengenai larangan dan potensi pelanggaran pemilu. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), yang perlu terus disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait.

SIARAN PERS



Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat, Fitriani, menyampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan pemilu ke depan juga menghadapi tantangan dari sisi sumber daya manusia. Perbandingan jumlah TPS dengan jumlah personel pengawasan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan. Karena itu, partisipasi masyarakat dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Kota Jakarta Barat, dibutuhkan untuk memperluas jangkauan pengawasan.

Penguatan pendidikan demokrasi juga menjadi bagian dari pembahasan. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jakarta Barat, Anta Ovia Bancin, menyampaikan bahwa Bawaslu sebelumnya telah melakukan audiensi dengan Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan menindaklanjutinya melalui kegiatan di sejumlah sekolah sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi dan pendidikan kepemiluan.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Abdul Roup, menambahkan bahwa masa non-tahapan merupakan waktu yang strategis untuk memperkuat upaya pencegahan. Ia menyampaikan adanya tren penurunan pelanggaran dari Pemilu 2017 hingga Pemilu 2024. Penurunan jumlah pelanggaran menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat hasil upaya pencegahan, meskipun penguatan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Selain itu, audiensi membahas koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja terkait kewenangan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Kejelasan mengenai kewenangan dan mekanisme penertiban dinilai penting agar koordinasi antarlembaga dapat berjalan efektif ketika memasuki tahapan pemilu.

Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) juga menyampaikan rencana untuk melibatkan Bawaslu Jakarta Barat dalam kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan politik.

Audiensi diakhiri dengan penyerahan buku dan plakat dari Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bawaslu Jakarta Barat memandang kolaborasi antarlembaga sebagai bagian penting dalam membangun pengawasan pemilu yang lebih partisipatif. Penguatan koordinasi sejak masa non-tahapan diharapkan dapat menjadi fondasi bagi upaya pencegahan dan pengawasan ketika tahapan pemilu mulai berjalan.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat

Jl. Kebon Jeruk Raya No. 64A,

Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat 11530

